

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan adalah sebuah istilah yang problematik. Sebagai sebuah turunan dari konsep pembangunan, pemberdayaan dijadikan solusi untuk menambal lubang-lubang pembangunan. Berbagai fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Marthinussen (1995, hlm: 31), pembangunan ekonomi merupakan fakta yang bersifat umum dan agregatif, sedangkan pemerataan pembangunan bersifat khusus dan terdistribusi untuk semua lapisan masyarakat.

Pemberdayaan menjadi jembatan penghubung jurang ketimpangan sosial akibat pembangunan yang tidak merata. Melalui berbagai program pemberdayaan, warga negara yang tidak beruntung diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Akan tetapi, untuk konteks Indonesia sejak tahun 1970an istilah pemberdayaan, yang telah didiskusikan dan dipraktikkan dalam bentuk kebijakan, belum menemukan maknanya yang tepat. Pemberdayaan lebih sering menjadi jargon dan retorika dari pemerintah maupun masyarakat sipil untuk menjadikan mereka yang tidak beruntung sebagai objek kepentingan mereka. Pemberdayaan yang seperti itu justru membuat warga negara semakin teresklusi dari pembangunan.

Tesis ini akan mendiskusikan pemberdayaan dalam makna yang sebenarnya. Hanya saja, cakupannya dibatasi dalam satuan tata ruang wilayah pesisir. Ada dua alasan yang melatarbelakangi pembatasan ini. *Pertama*, konsep pembangunan masyarakat lebih memungkinkan diterapkan pada model pembangunan lokal (*locality development*) yang terbatas pada tingkat lokal secara geografis (Hikmat, 2004, hlm: 64-7). Model ini diharapkan lebih mampu menggerakkan masyarakat yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, serta mampu mengantisipasi perbedaan karakteristik antara wilayah daratan dengan wilayah pesisir dan

kelautan. *Kedua*, pembatasan ini juga dilatarbelakangi oleh prioritas permasalahan sosial, yaitu tereksklusinya komunitas pesisir secara sosial, ekonomi dan politik dalam pembangunan di republik ini.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang strategis bagi pengembangan model pengembangan wilayah pesisir. Kekayaan negara kepulauan ini meliputi lebih dari 17.500 pulau, 81.000 kilometer garis pantai, dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 5,8 juta kilometer laut persegi –lebih dari tiga kali luas daratannya. Keragaman hayatinya (*biodiversity*) terkaya di dunia. Menurut Knight, M dan S.Tighe, kurang-lebih 24 persen produksi ekonomi nasional berasal dari industri-industri berbasis wilayah pesisir. Termasuk diantaranya produksi gas dan minyak, penangkapan ikan, pariwisata, dan transportasi. Kekayaan ekosistem laut dan pesisir menyediakan sumberdaya lestari bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hasil-hasil laut mencukupi lebih dari 60 persen rata-rata kebutuhan protein penduduk secara nasional, dan hampir 90 persen di sebagian desa pesisir di tingkat lokal. Sekitar 60 persen dari 230 juta jumlah penduduknya tinggal di dalam radius 50 kilometer dari pesisir. Namun, kekayaan sumber daya laut belum memberi kontribusi maksimal bagi kesejahteraan komunitas pesisir. Kelompok nelayan pedesaan justru menjadi bagian dari kelompok masyarakat termiskin di Indonesia.

Akar masalah kemiskinan nelayan sangat kompleks. Kemiskinan nelayan dapat diakibatkan oleh eksploitasi berlebihan, degradasi sumberdaya, serta ketidakmampuan dan kegagalan mereka memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Sementara menurut pemerintah, melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), akar kemiskinan di daerah pesisir terjadi karena kepemilikan aset yang terlalu kecil atau potensi perikanan yang kecil, sehingga tidak ada peluang pengelolaan perikanan dan infrastruktur dalam bentuk kelembagaan ekonomi. Pendapat berbeda diutarakan oleh Kusnadi, seorang pakar antropologi kepulauan. Menurutnya, kemiskinan nelayan disebabkan karena faktor alamiah dan faktor non alamiah.

Termasuk dalam faktor alamiah adalah perbedaan produktifitas antara musim tangkap dan musim paceklik, sementara faktor non alamiah meliputi segala sesuatu yang mempersulit kehidupan nelayan. Faktor non alamiah yang

dimaksud Kusnadi (2007: 5) berhubungan dengan keterbatasan teknologi penangkapan ikan, ketimpangan sistem bagi hasil, kelemahan jaringan pemasaran, kelemahan lembaga sosial kemasyarakatan, ketiadaan jaminan sosial, serta dampak negatif dari kebijakan modernisasi perikanan. Sebagian dari faktor-faktor non alamiah tersebut menurut Kusnadi merupakan akibat dari kekeliruan kebijakan pemerintah.

Akses komunitas pesisir pada sumber pemodal juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan mereka. Menurut Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PSKP Jember, komunitas pesisir sangat sedikit yang memiliki kemampuan untuk mengakses modal, terutama ke perbankan. Selama ini mereka mendapatkan dukungan modal dari rentenir atau pedagang ikan skala besar. Namun, bantuan modal tersebut seringkali menuntut jaminan atau agunan yang sebenarnya tidak akan bisa di lunasi oleh peminjamnya. Sebagai akibatnya, ekonomi keluarga di pesisir tergantung para para rentenir dan pedagang besar. Terciptalah hubungan subordinasi antara pemilik modal dengan nelayan kecil.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang mendera kehidupan nelayan tidak hanya karena faktor daya dukung lingkungan pesisir dan kelemahan kualitas sumber daya manusia dari komunitas pesisir. Mereka tereksklusi dari pembangunan, karena itu negara dan masyarakat secara umum juga harus bertanggung jawab atas kemiskinan nelayan. Ketiga faktor tersebut, lingkungan, sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah dan masyarakat sipil memiliki kontribusi pada kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan nelayan tidak bisa diserahkan kepada nelayan dan komunitas pesisir saja. Intervensi dari lingkungan eksternal komunitas di butuhkan, baik melalui 'tangan' negara, maupun masyarakat sipil, untuk membantu komunitas pesisir bangkit dari keterpurukan.

Selama lebih dari 30 tahun terakhir, berbagai upaya telah di lakukan oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi sipil untuk menata kehidupan yang lebih baik di wilayah pesisir. Hanya saja, pembangunan tersebut masih berorientasi pada peningkatan pendapatan. Pada masa Orde Baru, tepatnya di awal tahun 1980an, pemerintah dengan giat mendorong peningkatan produktifitas hasil penangkapan ikan dengan kebijakan modernisasi peralatan tangkap. Modernisasi

tersebut dilakukan dengan memperkenalkan teknik dan teknologi modern dalam menangkap ikan, seperti penggunaan perahu sleret (kapal tangkap berukuran besar dilengkapi dengan motor tempel) dan pukat harimau. Pendekatan modernisasi ini sempat meningkatkan pendapatan nelayan, tapi tidak berlangsung lama. Namun, teknik ini cenderung eksploitatif, sehingga dalam jangka panjang justru mengakibatkan kerusakan biota laut dan menurunkan daya dukung alam. Akibatnya, produktifitas nelayan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

Di akhir 80-an dan awal 90-an, pendekatan produktifitas mulai ditinggalkan, dan bergerak ke arah bantuan modal. Salah satu program yang cukup mendapat sorotan adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT). Perkembangan pendekatan ini terus berlanjut hingga perluasan akses pada modal finansial. Puncak perkembangannya adalah bantuan modal melalui dana bergulir (*revolving fund*).

Pasca reformasi, perhatian negara pada sektor perikanan semakin intensif. Dua tahun setelah Departemen Kelautan dan Perikanan didirikan (26 Oktober 1999), DKP meluncurkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan nelayan oleh pemerintah. Program ini menyalurkan pinjaman mikro bergilir (*revolving fund*) kepada komunitas pesisir yang dibagi dalam empat kelompok pemanfaat (sasaran). Yaitu, kelompok nelayan, kelompok pedagang, kelompok pengolah, dan kelompok pembudidaya. Program ini sepenuhnya di fokuskan pada pengembangan kegiatan ekonomi produktif dan berlaku seragam untuk seluruh desa nelayan di Indonesia (Kusnadi, 2002: 36-7).

Program ini juga belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penyeragaman bentuk pemberdayaan masyarakat menjadi kelemahan PEMP. Program ini telah mengesampingkan potensi-potensi lokal serta tantangan-tantangan kehidupan nelayan yang unik di setiap daerah. Padahal, menurut Kusnadi (2007), setiap desa nelayan memiliki karakteristik dan permasalahan yang tidak persis sama. Contohnya, ada daerah pesisir yang perairannya memiliki banyak ikan, seperti di daerah Selatan Pulau Jawa. Sebaliknya, di Pantai Utara Jawa banyak juga daerah yang telah mengalami kelebihan tangkap (*over fishing*),

dimana jumlah ikan sudah tidak sebanding dengan jumlah nelayan yang menangkap ikan disana.

Selain pemerintah, masyarakat sipil telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas pesisir. Sebagian dari mereka mengembangkan metode bantuan dana bergulir, melalui pembentukan lembaga keuangan mikro, seperti koperasi simpan-pinjam. Disamping itu, tidak sedikit juga yang memberdayakan komunitas pesisir melalui pembentukan institusi lokal yang berfungsi sebagai pusat komunitas. Dengan memberdayakan komunitas secara partisipatif melalui institusi lokal, para aktifis pemberdayaan tersebut membantu mengorganisir komunitas mereka.

Akan tetapi, model ini bukan tanpa kelemahan. Terkadang, para aktifis pemberdayaan terlalu memainkan peran sentral sehingga komunitas bukannya menjadi mandiri, justru semakin tergantung. Fenomena ini akan mungkin saja terjadi, bila komunitas tidak diberikan dukungan dan kesempatan untuk mengembangkan jaringan mereka (Hikmat, 2004). Kedua, karena geraknya sporadis dan terbatas pada lokasi tertentu, dampak program secara keseluruhan hanya bisa dinikmati oleh komunitas yang menjalankan program tersebut.

Pemberdayaan komunitas pesisir juga bisa dijalankan oleh kalangan pengusaha. Melalui kemitraan antara pengusaha dengan komunitas dalam bentuk inti-plasma. Kemitraan tersebut tentu saja tidak bisa diterapkan begitu saja. Sebab, dalam logika pengusaha, kemitraan tersebut bisa dilakukan bila memenuhi prasyarat efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan produksi mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan satu kondisi-kondisi tertentu sehingga kemitraan tersebut bisa berjalan. Bila kondisi tersebut tidak ada, harus ada insentif tertentu bagi pengusaha untuk menjalin kemitraan inti-plasma dengan komunitas. Disinilah letak strategis peran pemerintah.

Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan program-program pemberdayaan yang telah berjalan selama ini belum berhasil. Pelaksanaan program pemberdayaan tersebut masih terlalu fokus pada hasil. Basis kegiatan program masih berputar di seputar pendapatan dan pengeluaran dari keluarga yang tinggal di kawasan pesisir. Program tersebut belum masuk dalam substansi

pemberdayaan itu sendiri, yaitu meningkatkan kemampuan komunitas untuk menentukan pilihannya sendiri.

Program pemberdayaan komunitas wilayah pesisir harus mampu meningkatkan keterlibatan komunitas dalam pembangunan. Upaya-upaya peningkatan pendapatan dengan bantuan dana bergulir, pelibatan anggota dengan sukarela, mobilisasi partisipasi komunitas kedalam program, tidak akan banyak membantu komunitas bila mereka tidak dilibatkan dengan aktif. Seharusnya mereka diberikan kepercayaan untuk menentukan pilihan mereka. Sayangnya, substansi pemberdayaan inilah yang tidak bisa dipenuhi oleh kebanyakan program-program pemberdayaan yang sudah-sudah. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dari komunitas.

Gagasan pemberdayaan sendiri telah sejak lama meninggalkan pendekatan-pendekatan mobilisasi. Penekanan pada proses dengan pelibatan partisipasi aktif kelompok sasaran menjadi salah satu unsur penting dalam aktifitas pemberdayaan. Apabila unsur ini ditinggalkan, maka pemberdayaan tersebut hanya akan menjadi retorika dari suatu aktifitas lain yang lebih tepat disebut dengan pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat yang tidak beruntung.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mencari alternatif-alternatif dalam pengembangan model pemberdayaan untuk komunitas pesisir yang mampu meningkatkan keterlibatan komunitas dalam proses sosial. Sebab, disinilah substansi dari pemberdayaan itu sendiri, yaitu menanggulangi eksklusi sosial yang kini dialami oleh komunitas pesisir, terutama dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya, ada tiga alternatif model pemberdayaan yang bisa dijadikan tipe ideal yang dapat diadaptasikan untuk memberdayakan komunitas pesisir. *Pertama*, bentuk koperasi perikanan, sebagaimana yang dijalankan oleh DKP melalui program PEMP. *Kedua*, pusat komunitas, sebagaimana dengan yang dijalankan oleh masyarakat sipil. *Ketiga*, melalui kemitraan antara pengusaha besar, dan komunitas pesisir melalui inti plasma.

Contoh-contoh yang telah dijabarkan sebelumnya telah menunjukkan kesejahteraan nelayan tidak bisa dicapai melalui pendekatan ekonomi *an sich*, dan mengesampingkan konteks sosial serta budaya komunitas pesisir. Upaya-upaya pemberdayaan nelayan melalui intervensi kepada individu nelayan dan kelompok nelayan selama ini hampir selalu berakhir dengan kegagalan. Seperti yang terjadi pada model-model pemberdayaan yang selama ini diterapkan kepada nelayan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Kebutuhan akan strategi pemberdayaan yang baru jelas semakin mendesak.

Ketiga alternatif di atas telah banyak diterapkan dengan bermacam hasil. Namun, substansi dalam pemberdayaan tidak terletak pada tujuan akhirnya (*ends*), melainkan pada proses pemberdayaan itu sendiri (*means*). Sebuah proses pemberdayaan yang benar memberikan kuasa (*power*) pada kelompok sasaran untuk bertransformasi kearah yang mereka pilih sendiri. Keberhasilan upaya pemberdayaan tidak hanya ditentukan pada pelaksanaan program, melainkan sejak perencanaannya. Sejauh mana komunitas diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan mereka.

Penelitian ini ditujukan untuk mencari alternatif-alternatif dalam pengembangan model pemberdayaan untuk komunitas pesisir yang mampu meningkatkan keterlibatan komunitas dalam proses sosial. Sebab, disinilah substansi dari pemberdayaan itu sendiri, yaitu menanggulangi eksklusi sosial yang kini dialami oleh komunitas pesisir, terutama dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sebesar apa peluang keberhasilan tiga alternatif model pemberdayaan (koperasi, pusat komunitas, inti-plasma) yang paling tepat untuk diterapkan di Kecamatan Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat.

1.4 Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan prioritas model pemberdayaan dari alternatif-alternatif model pemberdayaan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini tentunya bisa menjadi pelengkap literatur yang membahas tema pembangunan kawasan pesisir. Selain itu, dengan tujuan penelitian untuk

merumuskan sebuah model pemberdayaan, maka secara praktis, hasil temuan dan kesimpulan dari penelitian ini akan menjadi rekomendasi kebijakan bagi pengembangan model pemberdayaan masyarakat pesisir bagi Bappeda Kabupaten Sukabumi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi.

Ruang lingkup penelitian menitikberatkan pada penggalian informasi (eksploratif) persepsi komunitas, baik di level elit, termasuk para perumus kebijakan, dan di level akar rumput, terutama rumah tangga perikanan, mengenai alternatif model pemberdayaan. Melalui data persepsi responden yang terkumpul, dirumuskan gambaran umum dari setiap alternatif model yang memiliki relevansi untuk diterapkan di Palabuhanratu.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan basis metodologi penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap perancangan model dan tahap uji model. Pengumpulan data untuk kedua tahap tersebut dilakukan dengan survei tatap muka. Namun, analisis data dilakukan dengan dua metode analisis yang berbeda, tahap pertama menggunakan analisis proses hirarki (AHP), sementara tahap kedua menggunakan analisis statistik deskriptif.

Tahap pertama atau tahap perancangan model bertujuan untuk mengidentifikasi model pemberdayaan terbaik. Melalui analisis AHP, alternatif-alternatif model pemberdayaan diuji berdasarkan kriteria berikut indikatornya. Data yang terkumpul di analisis dengan metode AHP untuk membandingkan prioritas alternatif berdasarkan pendapat responden ahli, yang sampelnya dirancang secara purposif sesuai dengan kriteria tertentu.

Tahap kedua adalah tahap evaluasi model. Tahap ini bertujuan untuk menguji model pemberdayaan yang telah dirancang berdasarkan hasil dari tahap pertama. Pengujian model dilakukan dengan menanyakan langsung ke sejumlah responden yang sampelnya diambil secara acak dari populasi komunitas pesisir di Kelurahan atau Desa Palabuhanratu dan Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu.

1.5.2 Strategi Penelitian

Sebagaimana telah dijabarkan diatas, penelitian ini akan melalui dua tahapan. Tahap perumusan model dilakukan dengan melakukan pengukuran alternatif model pemberdayaan terbaik melalui analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode AHP diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty (Alam, 1992). Pendekatan ini digunakan untuk menyusun urutan prioritas dari banyak pilihan yang melibatkan banyak kriteria. Pendekatan ini bekerja dengan menemukan skala rasio baik dari perbandingan pasangan yang diskrit maupun kontinyu dan menganalisisnya dengan rumus *pairwise comparison*. Menurut Dipo Alam (Alam, 1992) metode AHP adalah keadaan dimana informasi atau data dalam bentuk angka sangat minim atau tidak ada sama sekali. Data dan informasi tersebut bersifat kualitatif, dapat dirasakan dan dilihat (berupa persepsi, pengalaman, penginderaan, intuisi), tetapi tidak menunjang peneliti untuk membuat model kuantitatif dengan cara konvensional.

Tabel 1.1. Nilai Konversi Data Diskret ke Numerik

Skala Prioritas Numerik	Definisi (verbal)	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen memiliki bobot yang seimbang nilainya
3	Sebuah elemen lemah nilai kepentingannya terhadap yang lain	Pengalaman dan <i>judgement</i> agak menyukai sebuah elemen daripada yang lain
5	Sebuah elemen essensial atau lebih penting terhadap lain-lainnya	Pengalaman dan <i>judgement</i> lebih kuat menyukai sebuah elemen dari pada yang lain
7	Menunjukkan sebuah elemen lebih penting dari lainnya	Sebuah elemen lebih kuat disukai dan dominasinya terlihat nyata dalam keadaan yang sebenarnya
9	Secara absolut sebuah elemen lebih penting dari lainnya	Fakta sebuah elemen lebih disukai dari lainnya berada pada kemungkinan yang tertinggi pada urutan yang telah diketahui

2,4,6,8	Nilai <i>intermediate</i> antara dua <i>judgement</i> yang peringkatnya berdekatan	Kompromi diperlukan antara dua <i>judgement</i>
Kebalikan (1/3, 1/5, 1/7, dst)	Bila aktivitas I sebelumnya telah diberi bobot ketika dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya ketika dibandingkan dengan i	

Penggunaan AHP dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mengelaborasi keunggulan masing-masing alternatif model pemberdayaan. Alternatif tersebut antara lain model koperasi, pusat komunitas, atau perusahaan induk. Hasil analisis AHP dari setiap responden akan diakumulasikan melalui rata-rata rata-rata dari seluruh nilai persepsi responden.

$$x = \frac{\sum n}{N}$$

Keterangan:

x = rata-rata jumlah pendapat

n = nilai pendapat

N = jumlah responden

Teknik ini memiliki empat keunggulan. *Pertama*, kemampuannya untuk mengukur berbagai variabel dengan skala atau bidang yang beragam sekaligus. *Kedua*, menghindari bentrokan dalam analisa pengaruh dari masing-masing variabel, dimana terkadang perbaikan pengaruh yang satu hanya dapat dicapai dengan melemahnya pengaruh yang lain. *Ketiga*, menghasilkan sebuah prioritas yang meliputi/berlaku untuk semua skala. *Keempat*, AHP dapat mengukur rasio konsistensi data kualitatif yang telah dirubah dalam bentuk numerik.

Namun, kelemahan dari pendekatan ini juga bisa mempengaruhi validitas dari hasil penelitian. Kelemahan tersebut adalah, tingginya standar kapasitas responden yang dijadikan sampel atau objek penelitian. Penguasaan responden atas tema, kriteria dan subkriteria, serta alternatif yang sedang dianalisis juga harus terjamin. Dengan demikian, hanya orang-orang yang masuk dalam kualifikasi tersebut saja yang bisa menjadi responden. Karena itu, terkadang peneliti harus siap dan berhati-hati ketika menemui kondisi dimana responden

terpilih ternyata tidak begitu menguasai tema, kriteria-subkriteria maupun alternatif yang sedang diuji.

Tahap kedua penelitian ini merupakan tahap uji kelayakan model berdasarkan persepsi warga. Pada tahap ini, pertanyaan-pertanyaan mengenai pendapat responden mengenai alternatif model pemberdayaan ditanyakan melalui kuesioner. Data kuantitatif yang berhasil dikumpulkan, di olah dengan analisis statistik deskriptif non parametrik.

Penelitian tahap kedua ini sangat bergantung pada hasil perumusan model. Fokus pertanyaan survei adalah menguji peluang keberhasilan program pemberdayaan yang direkomendasikan oleh responden-responden ahli pada tahap pertama. Dalam hal ini, model yang diuji adalah Koperasi Perikanan.

Pengujian Koperasi Perikanan dilakukan dengan menguji variabel pengetahuan warga atas keberadaan program koperasi. Karena di dalam populasi penelitian sudah ada model pemberdayaan melalui koperasi (KUD dan LEPM3), maka pendapat warga atas program tersebut juga akan diukur dalam rangka mengukur kepuasan warga atas model koperasi yang sudah berjalan. Fokus ketiga adalah persepsi kepercayaan warga pada model koperasi yang baru.

1.5.3 Kerangka Sampel

Sampel untuk analisis perumusan model melalui metode AHP ditentukan dengan purposif dengan rencana total sampel 30 orang. Teknik ini dipilih karena pada tahap ini tujuan penelitian adalah menggali informasi mengenai model pemberdayaan dari para ahli. Dengan demikian, responden ditunjuk berdasarkan keahliannya. Adapun kriteria dari responden tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Kriteria Sampel Ahli

No	Kelompok Sampel	Kriteria
1	Akademisi	Berpengalaman minimal 5 tahun di bidang pemberdayaan masyarakat, diutamakan yang bergelar doktor
2	Politisi	Aktif dalam kepengurusan partai minimal di tingkat kabupaten, dengan masa keanggotaan minimal 3 tahun, diutamakan yang berstatus sebagai anggota legislatif baik lokal atau pusat
3	Birokrat	Masa pengabdian minimal 7 tahun, pernah terlibat dalam program pemberdayaan komunitas, diutamakan yang bertugas di Kab. Sukabumi atau Kec. Palabuhanratu
4	Pedagang	Berusaha di Palabuhanratu minimal selama 2 tahun
5	Aktifis	Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat minimal 3 tahun, dan telah bergabung dalam institusi yang bergerak di bidang pemberdayaan komunitas pesisir
6	Tokoh Masyarakat	Tinggal dan beraktifitas di Palabuhanratu lebih dari 7 tahun

Dalam pelaksanaan penelitian, responden yang berpartisipasi hanya 10 orang. Hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, membuat target jumlah responden 30 orang tidak tercapai. Hambatan-hambatan tersebut terjadi akibat kesulitan yang dialami peneliti untuk mencari responden yang tepat. Penguasaan atas model-model pemberdayaan yang di jabarkan dalam proposal penelitian ternyata sangat beragam dalam tataran lapangan. Kurangnya informasi yang dimiliki oleh para calon responden yang didatangi membuat sebagian responden menolak untuk berpartisipasi. Sementara beberapa responden lain tidak berhasil mencocokkan waktu untuk melakukan pengisian kuesioner melalui wawancara tatap muka.

Kesepuluh responden yang berpartisipasi memiliki latar belakang yang berbeda, sesuai dengan kelompok responden diatas. Lima orang responden berasal dari birokrat, 3 orang dari dinas perikanan Sukabumi, satu orang dari Bappeda Kab. Sukabumi, serta satu orang dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Peneliti tidak berhasil mewawancarai responden yang berlatarbelakang politisi.

Responden dari kalangan aktifis pemberdayaan berjumlah dua orang. Satu responden berlatarbelakang aktifis pemberdayaan, tetapi domisilinya di Jakarta,

satu lagi merupakan pengurus koperasi LEPM2R. Seorang responden lainnya bekerja sebagai peneliti di UKM Center dibawah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.. Satu orang responden berlatarbelakang tokoh masyarakat, sebagai aktifis DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Satu responden masuk dalam kategori pengusaha, sebagai seorang pemilik kapal (*Taweuh*).

Populasi yang di survei untuk menguji persepsi warga atas alternatif model terpilih hanya keluarga perikanan dari dua kelurahan atau desa yang paling berhubungan dengan sektor perikanan, yaitu Kelurahan Palabuhanratu dan Kelurahan Citepus. Jumlah keluarga perikanan di Kelurahan tersebut adalah 360KK (BPS Sukabumi, 2007). Sampel dari populasi di pilih dengan teknik acak bertingkat atau *stratified random sampling*.

Penarikan sampel dimulai dari pemilihan dua kelurahan yang paling dekat dengan dermaga, seperti yang telah disebutkan di atas. Kemudian, dari kedua kelurahan tersebut, dipilih tujuh dusun yang paling dekat dengan dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Setelah itu, responden akan diambil dengan metode *walking random sampling* yaitu kelipatan tiga ke kanan dari rumah ketua RT terdekat.

Cara lain untuk menghitung ukuran sampel didasarkan pada pendugaan proporsi populasi. Misalnya, berapa persen dari populasi menonton televisi, berapa persen tidak.

Rumus yang sederhana untuk ini ialah (Yamane, 1967:99):

Jumlah sampel yang terpilih diukur berdasarkan pendugaan proporsi populasi dengan rumus yang dikembangkan oleh Yamane (1967, hlm: 99).

$$n = \frac{N}{(Nx(d)^2) + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = tingkat presisi yang diharapkan

Pada tingkat presisi 10%, jumlah sampel adalah 78 orang, seperti hasil penghitungan di bawah ini.

$$n = \frac{360}{(360 \times (0,1)^2) + 1} = 78$$

Pelaksanaan survey di lapangan berhasil mengumpulkan data dari rencana sampel minimal. Untuk pengujian model koperasi, jumlah responden yang dilibatkan adalah 55 orang. Sementara untuk survey persepsi warga atas alternatif model pemberdayaan melibatkan responden sebanyak 84 orang.

1.5.4 Operasionalisasi Konsep

Perumusan model alternatif terbaik dilakukan dengan metode AHP. Pengukuran model tersebut dilakukan berdasarkan empat kriteria, beserta dengan subkriteria masing-masing. Responden diminta untuk memberikan bobot penilaian mereka pada seluruh kriteria dan subkriteria. Setelah itu, responden memberikan penilaiannya tentang alternatif model terbaik dari tiga alternatif yang ditanyakan. Berikut adalah penjelasan mengenai definisi operasional kriteria dan subkriteria yang digunakan sebagai alat ukur kekuatan masing-masing alternatif model pemberdayaan.

Kriteria pertama adalah efektifitas. Efektifitas merupakan ketepatan dan kebermanfaatan program atau model pemberdayaan bagi komunitas pesisir. Kriteria ini diukur melalui tiga subkriteria, yaitu manfaat sosial, manfaat ekonomi, dan manfaat lingkungan.

Kriteria kedua adalah efisiensi. Efisiensi merupakan kriteria program yang memperhitungkan ketepatan strategi pelaksanaan sehingga suatu program atau model dapat mencapai target maksimum dengan pengorbanan seminimal mungkin. Kriteria ini diukur dalam tiga subkriteria, yaitu sisi finansial atau keuangan, sisi pelaksanaan, dan sisi waktu.

Kriteria ketiga adalah responsif. Kriteria ini mengukur kemampuan program atau model pemberdayaan dalam menangkap aspirasi dan memberikan tanggapan atas kebutuhan komunitas pesisir. Kriteria ini diukur dengan dua subkriteria, yaitu kemampuan program menampung aspirasi komunitas, serta kemampuan program memberikan tanggapan atas aspirasi atau kebutuhan komunitas.

Kriteria keempat adalah penerimaan atau akseptabilitas. Kriteria akseptabilitas mengukur kemungkinan diterimanya program oleh komunitas.

Subkriteria yang mengukur kriteria tersebut adalah kesesuaian program atau model dengan hukum ketentuan formal yang berlaku, serta kesesuaian program dengan nilai dan kebiasaan di komunitas.

Survei untuk menguji model yang terbaik berdasarkan hasil tahap perumusan model dilakukan dengan menggali dua variabel utama. Variabel pertama adalah pengalaman komunitas pada alternatif model tersebut, bila sudah pernah diterapkan sebelumnya. Variabel kedua adalah keyakinan komunitas atas model tersebut. Selain kedua variabel utama tersebut, digali juga variabel-variabel lain yang dapat menunjang kesuksesan model pemberdayaan, seperti variabel jender, dan variabel status sosial ekonomi.

Penelitian tahap kedua ini sangat bergantung pada hasil perumusan model. Fokus pertanyaan survei adalah menguji peluang keberhasilan program pemberdayaan yang direkomendasikan oleh responden-responden ahli pada tahap pertama. Dalam hal ini, model yang diuji adalah Koperasi perikanan.

Pengujian koperasi perikanan dilakukan dengan menguji variabel pengetahuan warga atas keberadaan program koperasi. Karena di dalam populasi penelitian sudah ada model pemberdayaan melalui koperasi (KUD dan LEPM3), maka pendapat warga atas program tersebut juga akan diukur dalam rangka mengukur kepuasan warga atas model koperasi yang sudah berjalan. Fokus ketiga adalah persepsi kepercayaan warga pada model koperasi yang baru.

Analisis data dilakukan dengan metode statistik deskriptif untuk mencari nilai korelasi, serta statistik non parametrik untuk menguji keberlakuan model analisis di populasi.

1.5.5 Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

Instrumen pengumpulan data penelitian tahap perumusan model dan tahap pengujian model sama-sama menggunakan kuesioner. Tentu saja kedua kuesioner tersebut berisi pertanyaan yang berbeda, sesuai dengan tujuan pengukuran masing-masing variabel. lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 3. Operasionalisasi Konsep Kriteria, Subkriteri dan Aiternatif Model Pemberdayaan

Kriteria	Subkriteria	Alternatif	Cara Ukur	Alat Ukur
Efektifitas	Sosial	Kop/Puskom/Int-Plas	Wawancara	Kuesioner
	Ekonomi	Kop/Puskom/Int-Plas	Wawancara	Kuesioner
	Ekologi	Kop/Puskom/Int-Plas	Wawancara	Kuesioner
Efisiensi	Finansial	Kop/Puskom/Int-Plas	Wawancara	Kuesioner
	Aplikatif	Kop/Puskom/Int-Plas	Wawancara	Kuesioner
	Waktu	Kop/Puskom/Int-Plas	Wawancara	Kuesioner
Responsif	Tanggap	Kop/Puskom/Int-Plas	Wawancara	Kuesioner
	Aspiratif	Kop/Puskom/Int-Plas	Wawancara	Kuesioner
Akteptabilitas	Formal	Kop/Puskom/Int-Plas	Wawancara	Kuesioner
	Nilai	Kop/Puskom/Int-Plas	Wawancara	Kuesioner

Tabel 1. 4. Operasionalisasi Konsep Evaluasi Model

Dimensi	Indikator	Cara Ukur	Alat Ukur
Status Sosial Ekonomi	Pendapatan	Wawancara	Kuesioner
	Kepemilikan	Wawancara	Kuesioner
Evaluasi Program Pemberdayaan	Pengetahuan Tentang Program	Wawancara	Kuesioner
	Kesertaan dalam Program	Wawancara	Kuesioner
	Persepsi tentang Program	Wawancara	Kuesioner
Evaluasi Model Koperasi	Pengetahuan tentang Koperasi	Wawancara	Kuesioner
	Kesertaan dalam Kegiatan Koperasi	Wawancara	Kuesioner
	Persepsi Kinerja Koperasi	Wawancara	Kuesioner
Model Koperasi	Program Kerja	Wawancara	Kuesioner
	Skim Modal Bergulir	Wawancara	Kuesioner
	Pengelola	Wawancara	Kuesioner
	Teknis Operasional	Wawancara	Kuesioner
	Tingkat Kepercayaan	Wawancara	Kuesioner

Tabel 1.5. Operasionalisasi Konsep Persepsi Komunitas terhadap Alternatif Model Terbaik

Dimensi	Indikator	Cara Ukur	Alat Ukur
Status Sosial Ekonomi	Pengeluaran	Wawancara	Kuesioner
	Kepemilikan	Wawancara	Kuesioner
	Pendidikan	Wawancara	Kuesioner
Kriteria Efektifitas	Partisipasi	Wawancara	Kuesioner
	Pendapatan	Wawancara	Kuesioner
	Pemasaran	Wawancara	Kuesioner
Akseptabilitas	Aspiratif	Wawancara	Kuesioner
	Penerimaan	Wawancara	Kuesioner
Model Koperasi	Program Kerja	Wawancara	Kuesioner
	Skim Modal Bergulir	Wawancara	Kuesioner
	Pengelola	Wawancara	Kuesioner
	Teknis Operasional	Wawancara	Kuesioner
	Tingkat Kepercayaan	Wawancara	Kuesioner
Model Perusahaan	Pelaksana	Wawancara	Kuesioner
	Teknis Operasional	Wawancara	Kuesioner
	Penerimaan	Wawancara	Kuesioner
	Keuntungan	Wawancara	Kuesioner
	Tingkat Kepercayaan	Wawancara	Kuesioner

1.5.6 Metode Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data primer dilakukan melalui dua cara. *Pertama*, pengumpulan data melalui instrumen kuesioner dengan pertanyaan tertutup. *Kedua*, wawancara dengan narasumber terpilih. Wawancara ini ditujukan untuk memperoleh deskripsi kehidupan sosial sehari-hari di Kecamatan Palabuhanratu, terutama yang berkaitan dengan wilayah pesisir.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen. Dokumen-dokumen yang digunakan merupakan hasil penelitian atau hasil pengolahan data yang berkaitan dengan komunitas pesisir. Sumber data tersebut bisa berasal dari

jajaran birokrasi pemerintah yang terkait dengan wilayah pesisir, maupun karya-karya ilmiah yang membahas tema komunitas pesisir.

1.5.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program-program statistik yang dioperasikan melalui komputer. Ada dua program yang digunakan. *Pertama*, *Expert Choice 2000*, yang digunakan untuk membantu pengolahan data dengan analisis AHP. *Kedua*, SPSS Ver 11.5, yang digunakan untuk membantu pengolahan data dengan analisis statistik deskriptif non parametrik.

Proses analisa AHP akan melalui beberapa prinsip sebagai berikut:

- (i) *Decomposition*, yaitu mengurai persoalan atau variabel yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Langkah ini meliputi perumusan kriteria dan subkriteria serta model alternatif dalam kuesioner.
- (ii) *Comparative judgement*, dengan membuat penilaian tentang derajat kepentingan relatif dan elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Pengolahan data ini menggunakan program *expert choice*, dengan memasukkan data dari kuesioner kedalam matriks penghitungan
- (iii) *Synthesis of priority*, yaitu pengurutan elemen-elemen menurut derajat kepentingan relatif melalui prosedur sintesa yang sistematis. Pengolahan data ini menggunakan program *expert choice*, dengan memasukkan data dari kuesioner kedalam matriks penghitungan. Alternatif model yang terbaik adalah yang memiliki skor tertinggi berdasarkan pembobotan kriteria dan subkriterianya.
- (iv) *Logical consistency*, tingkat hubungan antara obyek-obyek yang diperbandingkan didasarkan pada kriteria tertentu untuk menghindari bias.

Pengolahan data hasil survei uji model dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

- (i) *Editing Data*, memeriksa kelengkapan kuesioner setelah disebarikan pada responden

- (ii) *Coding Data*, memberikan simbol berupa angka dari setiap item jawaban dalam kuesioner
- (iii) *Entry Data*, memasukkan data dari kuesioner kedalam program SPSS
- (iv) *Cleaning Data*, mengecek ulang kelengkapan data yang telah dimasukkan dalam program untuk kesempurnaan analisis.

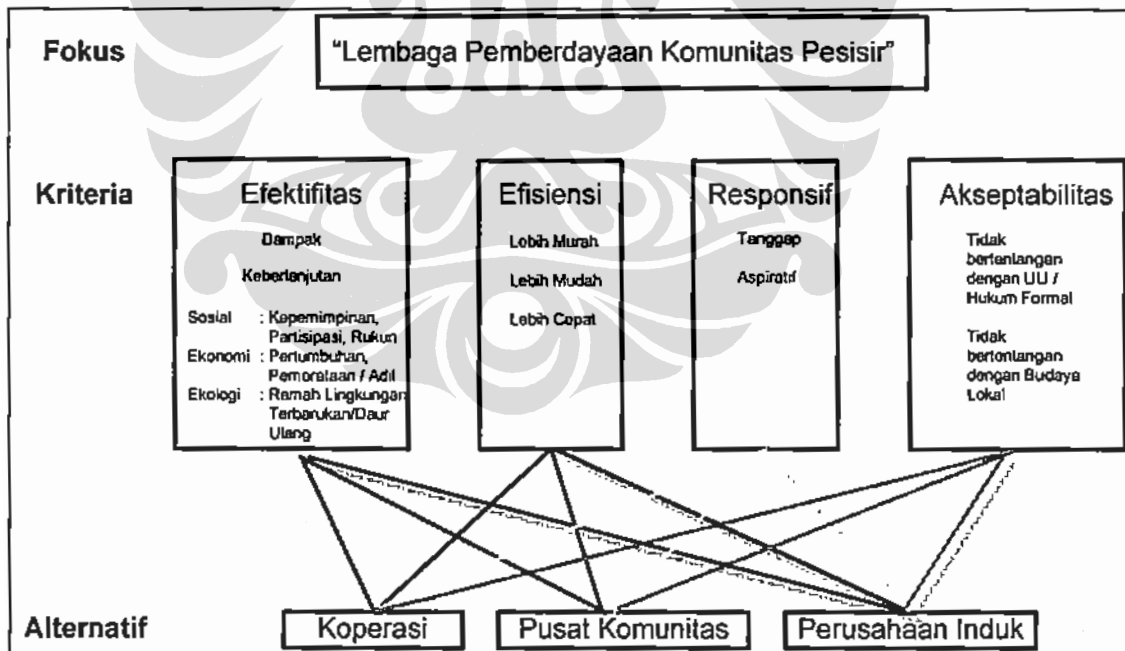
Analisis data yang digunakan meliputi:

- Uji prioritas model dengan rumus *pairwise comparison*
- Uji statistik nonparametrik dengan rumus *chi square*, dan *asosiasi sommers'd*, serta *wilcoxon*, *pearson correlation*, dan *regretion*

Seluruh hasil analisis disajikan dalam tabulasi.

1.5.8 Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam perumusan alternatif model pemberdayaan terbaik adalah sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.



Gambar 1.1. Model Analisis AHP

1.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama empat bulan dengan rincian kegiatan seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6 Jadwal Tahapan Penelitian

Nomer	Keterangan	Jadwal Pelaksanaan
1	Perumusan Proposal Penelitian	Februari 2008 – Maret 2008
2	Uji instrumen Survey AHP Survey Evaluasi Model Terbaik Survey Persepi atas Model Pemberdayaan	20 April 2008 – 26 April 2008 11 Mei 2008 – 23 Mei 2008 25 Mei 2008 – 27 Mei 2008 16 Juni 2008 – 18 Juni 2008
3	Pengolahan Data	Mei2008 – Juni 2008
4	Analisis	Mei2008 – Juni 2008
5	Presentasi Tesis	8 Juli 2008

1.7 Batasan Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif dan ditujukan untuk mencari alternatif terbaik model pemberdayaan komunitas pesisir di Kecamatan Palabuhanratu, Sukabumi. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau mengevaluasi suatu bentuk model pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penjelasan mengenai bentuk dan arah hubungan antar variabel yang diteliti tidak terlalu di persoalkan.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data *analytical heararchic process* (AHP) dan survei. Metode AHP bertujuan untuk menguji prioritas variabel-variabel yang diperhitungkan secara konsisten. Disinilah letak kelebihan dari metode ini. Akan tetapi, perhatian atas hubungan antar variabel tidak terlalu diperhitungkan, karena sudah diasumsikan terlebih dahulu.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab1 bertujuan untuk menjelaskan latar belakang, serta metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini berbasis pada pendekatan kuantitatif.

Bab 2 bertujuan untuk menjabarkan konsep-konsep yang digunakan dalam analisis model pemberdayaan komunitas pesisir. Pada bagian ini, dijabarkan

mengenai studi literatur implementasi model pemberdayaan pada komunitas pesisir, serta studi teoritik atas konsep-konsep pemberdayaan.

Bab 3 bertujuan untuk mendeskripsikan profil daerah penelitian. Pembahasan didalamnya meliputi potensi wilayah, dinamika kependudukan, serta deskripsi singkat mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan yang telah dijalankan di Kecamatan Palabuhanratu, berikut dengan aktor-aktor yang terlibat.

Bab 4 bertujuan untuk menganalisis data temuan lapangan. Analisis data menggunakan teknik AHP dan analisis statistik nonparametrik. Analisis data ditujukan untuk menakar peluang masing-masing model pemberdayaan berdasarkan persepsi dari responden elit, maupun di tingkat akar rumput.

Bab 5 adalah penutup dari tesis. Di dalam bab tersebut, kesimpulan dan saran di jabarkan dengan ringkas. Termasuk didalamnya ada saran bagi terselenggaranya penelitian lanjutan.

